

Penilaian	Bobot	Nilai	%
-----------	-------	-------	---

A. PENGUNGKIT				
I. PEMENUHAN				
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	2,72	67,89%
2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50	1,77	50,43%
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	4,14	82,83%
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	4,43	88,54%
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	2,98	39,78%
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	1,97	39,32%
II. REFORM				
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	1,00	25,00%
2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50	1,34	38,14%
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	2,25	45,00%
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	3,20	63,90%
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	2,00	26,67%
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	1,68	33,50%
TOTAL PENGUNGKIT		29,45	49,09%	

Catatan/Keterangan/Penjelasan	Rekomendasi
-------------------------------	-------------

1. Penentuan anggota Tim belum seluruhnya dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas serta belum seluruhnya mewakili unsur unit kerja, 2. target prioritas dalam pembangunan ZI belum relevan dan masih bersifat umum	
1. monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan namun tidak secara berkala 2. SOP utama telah dilakukan evaluasi namun belum terdokumentasi	
1. monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala, 2. belum adanya kebijakan dalam pemberian reward, 3. Belum terdapat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	
penguatan akuntabilitas pada BPVP Samarinda cukup baik	
1. monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan namun tidak secara berkala, 2. Belum terdapat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System pada BPVP Samarinda, 3. penanganan Benturan Kepentingan telah dievaluasi namun tidak secara berkala oleh unit kerja	
1. BPVP Samarinda sudah melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan dari pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders, 2. pelatihan/sosialisasi pelayanan prima telah dilaksanakan namun belum adanya monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/ pelaksana layanan, 3. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar, 4. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan terkait SP4N-LAPOR!	

Penilaian	Bobot	Nilai	%
-----------	-------	-------	---

A. PENGUNGKIT				
I. PEMENUHAN				
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	2,97	74,14%
2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50	1,77	50,43%
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	4,14	82,83%
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	4,43	88,54%
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	4,11	54,78%
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	4,39	87,82%
II. REFORM				
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	1,00	25,00%
2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50	1,34	38,14%
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	2,25	45,00%
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	3,20	63,90%
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	2,00	26,67%
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	4,59	91,75%
TOTAL PENGUNGKIT		29,45	49,09%	

Catatan/Keterangan/Penjelasan	Rekomendasi
-------------------------------	-------------

1. Penentuan anggota Tim belum seluruhnya dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas serta belum seluruhnya mewakili unsur unit kerja, 2. target prioritas dalam pembangunan ZI belum relevan dan masih bersifat umum	
1. monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan namun tidak secara berkala 2. SOP utama telah dilakukan evaluasi namun belum terdokumentasi	
1. monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala, 2. belum adanya kebijakan dalam pemberian reward, 3. Belum terdapat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	
penguatan akuntabilitas pada BPVP Samarinda cukup baik	
1. monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan namun tidak secara berkala, 2. Belum terdapat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System pada BPVP Samarinda, 3. penanganan Benturan Kepentingan telah dievaluasi namun tidak secara berkala oleh unit kerja	
Masih beberapa Dokumen yang belum diupload digoogle drive di reform	

